



# Kesenjangan Keterampilan Kerja Sebagai Krisis Ekonomi: Kajian Naratif Terhadap Respon dan Kegagalan Kurikulum Nasional

Indra Simanungkalit<sup>1\*</sup>, Christian Arief Jaya<sup>2</sup>, Satria Ridho Damara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

## \*Corresponding Author:

[indrasimanungkalit@mail.unnes.ac.id](mailto:indrasimanungkalit@mail.unnes.ac.id)

## Article History:

Received 2026-04-10

Revised 2026-05-20

Accepted 2026-05-24

## Keywords:

Skills, Economic Crisis, Curriculum.

## Kata Kunci:

Keterampilan, Krisis Ekonomi, Kurikulum.

## Abstract

The Era of digital disruption demands high adaptability of human resources, but Indonesia is facing high unemployment due to the mismatch of educational graduate qualifications with the real needs of the industrial world. This study aims to examine the phenomenon of job skills gap as an economic crisis and evaluate the effectiveness of the national curriculum response. This study used a literature review. Data collection was conducted through literature searches such as Google Scholar, SINTA, and ERIC, where the analyzed articles totaled 19 articles published from 2016 to 2026, the subject of analysis focused on literature related to education policy and curriculum implementation in Indonesia. The results showed that the economic crisis is rooted in the deficit of high-level thinking skills and low digital literacy of graduates that are not relevant to the needs of cutting-edge industries. The main factors of failure include the involvement of industries that are merely tokenism (limited to administrative MoUs), the slowness of education bureaucracy, the lack of exposure of educators' competencies to modern industries, and evaluation systems that are still oriented to capabilities on paper. The national curriculum still fails to respond to the economic crisis due to slow adaptation and not yet substantial collaboration, so the education ecosystem is more focused on scoring graduates who focus on theoretical exams than individuals who are ready and skilled to work.

## Abstrak

Era disrupsi digital menuntut adaptabilitas sumber daya manusia yang tinggi, namun Indonesia justru menghadapi tingginya angka pengangguran akibat ketidaksesuaian kualifikasi lulusan pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia industri. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena kesenjangan keterampilan kerja sebagai krisis ekonomi serta mengevaluasi efektivitas respon kurikulum nasional. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur seperti Google Scholar, SINTA, dan ERIC, dimana artikel yang dianalisis berjumlah 19 artikel yang terbit tahun 2016 hingga 2026, subjek yang analisis difokuskan pada literatur terkait kebijakan pendidikan dan implementasi kurikulum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ekonomi berakar dari defisit kemampuan berpikir tingkat tinggi dan rendahnya literasi digital lulusan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri mutakhir. Faktor utama kegagalan tersebut mencakup keterlibatan industri yang sekadar tokenisme (sebatas MoU administratif), kelambanan birokrasi pendidikan, minimnya paparan kompetensi pendidik terhadap industri modern, serta sistem evaluasi yang masih berorientasi pada kemampuan di atas kertas. Kurikulum nasional masih gagal merespon krisis ekonomi karena adaptasi yang lambat dan kolaborasi yang belum substansial, sehingga ekosistem pendidikan lebih terfokus mencetak lulusan yang berfokus pada ujian teori daripada individu yang siap dan terampil bekerja.

## PENDAHULUAN

Lanskap ekonomi global telah menghadapi perubahan disrupsi struktural secara masif. Peralihan menuju era digitalisasi dengan hadirnya kecerdasan buatan telah mengubah peta kebutuhan industri secara signifikan. Pergeseran ini berimbas kedalam dunia usaha dan dunia industri yang menuntut keterampilan dan adaptabilitas yang tinggi dari sumber daya manusia untuk kerja dimana model bisnis konvensional sudah digantikan oleh ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Di tengah masa



peralihan tersebut muncul sebuah fenomena di pasar tenaga kerja dimana menurut Badan Pusat Statistik tahun 2025 angka pengangguran terbuka masih sangat tinggi yaitu sebesar 4,74% atau sekitar 7,35 juta penduduk. Disisi lain, untuk sektor industri masih memiliki hambatan dalam memilih pekerja atau karyawan yang secara kualifikasi relevan dan berkualitas (Hafiza et al., 2020). Dapat dikatakan bahwa akar permasalahan saat ini bukan karena kurangnya lapangan pekerjaan melainkan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan di Indonesia dengan keterampilan kerja di dunia industri, misalnya tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan kesehatan bekerja di bidang perbankan (Dilly, 2021).

Kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan formal dengan tuntutan industri tidak hanya sekedar permasalahan pedagogis atau masalah didalam sekolah, masalah ini juga menimbulkan krisis ekonomi jangka panjang seperti makin melebarnya angka pengangguran, adanya stagnasi produktivitas dan inovasi di perusahaan serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat. Ketika angkatan kerja tidak terserap dengan baik pada pasar kerja maka menimbulkan ekonomi melambat dan ketertinggalan pendapatan perkapita. Dalam menghadapi krisis keterampilan ini, sistem pendidikan nasional seharusnya menjadi garda terdepan dalam menghasilkan output yang berkualitas. Dengan pendidikan yang baik akan menghasilkan output yang baik pula (Maryono, 2016). Kurikulum nasional dalam paradigma sebagai alat memegang mandat sebagai cetak biru dalam membentuk manusia yang terampil. Kurikulum yang baik tidak hanya mentransfer pengetahuan teoritis semata melainkan sebagai instrumen yang strategis dalam menghasilkan generasi muda yang produktif dan adaptif demi menyongsong Indonesia emas 2045 di masa yang akan datang.

Kenyataan pada implementasi kurikulum nasional di Indonesia juga menunjukkan adanya kelambanan respon pada pergeseran tren ekonomi. Kurikulum seringkali terjebak dalam pembelajaran yang masih kaku dan berpusat pada pencapaian akademis teoritis kurangnya pembelajaran literasi digital, kurangnya penekanan pada keterampilan abad 21 serta keterlibatan industri dalam mendesain pembelajaran membuat sistem pendidikan tereliminasi dari realitas pasar kerja sehingga sekali lagi gagal mencetak lulusan yang mampu beradaptasi (Nana Rismana & Sari Hernawati, 2019). Berbagai penelitian dan literatur sebelumnya telah mengkaji isu pengangguran, efektivitas pendidikan. Hasil penelitian (Nana Rismana & Sari Hernawati, 2019) lebih banyak berfokus pada deskripsi adaptasi kurikulum baru mengenai mengapa rangkaian perubahan kebijakan tersebut secara historis gagal menyelesaikan masalah skill gap di pasar kerja. Sedangkan dari segi penggunaan metode, penelitian terdahulu masih sering menggunakan analisis statistik deskriptif, atau metode kuantitatif untuk menunjukkan kesenjangan skill di dunia kerja (Hafiza et al., 2020).

Menjembatani kesenjangan literatur tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara mendalam fenomena kesenjangan keterampilan kerja sebagai krisis ekonomi yang disebabkan oleh kurikulum nasional. Melalui metode naratif, kajian ini akan menyintesis berbagai literatur terkait kebijakan pendidikan nasional di Indonesia, implementasi kurikulum merdeka, mengidentifikasi celah dalam kurikulum merdeka dan menawarkan perspektif baru mengenai penyesuaian ulang antara kurikulum nasional dengan tuntutan industri saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur naratif (*narrative literature review*). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada berbagai basis data akademis bereputasi, yaitu Google Scholar, SINTA (*Science and Technology Index*), dan ERIC.

Artikel yang dipilih dan dianalisis berada dalam rentang tahun 2016 hingga 2026, guna memastikan relevansi data dengan dinamika kebijakan pendidikan dan industri terkini. Literatur yang dipilih melalui kriteria inklusi dan eksklusi, Adapun kriteria inklusinya yaitu (1) Artikel ilmiah yang membahas kebijakan pendidikan dan implementasi kurikulum di Indonesia; (2) Literatur yang berkaitan langsung dengan isu kesenjangan keterampilan (skills gap) dan dampaknya terhadap ekonomi; (3) Studi yang mengevaluasi respon pemerintah melalui kebijakan "Link and Match" atau Kurikulum. Sementara kriteria eksklusi yaitu Artikel yang tidak memiliki relevansi dengan konteks pendidikan di Indonesia atau artikel yang terbit di luar rentang tahun yang telah ditentukan. Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui pencarian menggunakan kata kunci utama seperti "Skill", "Economic Crisis", dan "Curriculum". Dari hasil pencarian awal, peneliti mendapatkan 30 artikel, kemudian peneliti melakukan skrining terhadap judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, terpilih 19 artikel kunci yang dianalisis secara mendalam sebagai landasan sintesis naratif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis naratif untuk menyintesis berbagai literatur terkait kebijakan pendidikan nasional. Analisis difokuskan pada: Identifikasi fenomena kesenjangan keterampilan sebagai krisis ekonomi, evaluasi terhadap efektivitas implementasi kurikulum nasional (khususnya Kurikulum Merdeka), pemetaan faktor-faktor penyebab kegagalan adaptasi kebijakan, seperti tokenism industri dan kelambanan birokrasi serta penyusunan perspektif baru mengenai penyelarasan ulang kurikulum dengan tuntutan industri. Validitas data dalam kajian ini dijaga melalui triangulasi sumber literatur, di mana peneliti membandingkan temuan dari berbagai artikel jurnal, laporan survei global (seperti laporan PISA), dan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan konsistensi argumen yang dibangun. Selain itu, penggunaan basis data terindeks seperti SINTA dan ERIC memastikan bahwa literatur yang disintesis memiliki kredibilitas akademik yang tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesenjangan Keterampilan Kerja

Kesenjangan antara profil lulusan dan kebutuhan pasar tenaga kerja terjadi karena dua hal yaitu yang pertama, adanya defisit keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Di dunia industri menuntut kemampuan pemecahan masalah yang kompleks dan kontekstual. Namun, menurut hasil laporan PISA Tahun 2022 (OECD, 2023), Indonesia mendapatkan skor 366 atau berada di peringkat ke-67 dari 81 negara. Hal ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan pembelajaran masih berfokus pada kemampuan berpikir tingkat rendah (*low order thinking skills*) dimana siswa dan mahasiswa belajar dengan menggunakan teknik hafalan dan lebih senang mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Menurut Penelitian (Rani Irmawati, Aisyah Rahayu, 2022). Menurut Polya dalam (Anwar et al., 2025) ada empat indikator dalam kemampuan pemecahan masalah yaitu memahami masalah, membuat dan melaksanakan rencana, dan mengevaluasi kembali. Indikator tersebut akan sejalan dengan tingkatan soal pada HOTS. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis memerlukan latihan yang mendalam dan waktu yang cukup lama. Kemampuan berpikir kritis juga didapat dari kegiatan berdiskusi di kelas antar sesama kelompok dan kemudian membandingkan hasil jawaban antar kelompok diskusi (Kusuma et al., 2024). Berdasarkan berbagai survei pendidikan global seperti PISA, siswa Indonesia sering kali masih kesulitan dalam memahami dan mengolah teks atau data yang kompleks. Kurangnya kemampuan berpikir kritis membuat banyak lulusan tidak memiliki fondasi bernalar yang kuat. Akibatnya, mereka kurang terbiasa memecahkan masalah (*problem solving*) atau beradaptasi dengan informasi baru, padahal kemampuan ini adalah kompetensi inti yang dicari untuk siap kerja (Kurniawan et al., 2021). Kedua, kesenjangan literasi digital dan teknologi.

Kesenjangan literasi dan teknologi dalam sistem pendidikan di Indonesia merupakan akar masalah yang secara langsung berdampak pada kesiapan tenaga kerja di masa depan. Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang menantang, distribusi akses dan infrastruktur di Indonesia belum adil dan merata (Hendrayadi & Yunus, 2025). Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara sekolah-sekolah di Perkotaan dengan yang ada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Dari segi literasi digital, tantangan di Indonesia bukan lagi sebatas mengakses informasi dan mengoperasikan perangkat keras melainkan bagaimana cara membedakan informasi yang valid dari sumber terpercaya, memiliki etika ketika berkomunikasi di dunia maya, (Anisti et al., 2024). Di era revolusi industri 4.0, penguasaan teknologi dasar hingga menengah adalah sebuah keharusan. Namun, kenyataannya banyak institusi pendidikan yang belum memiliki akses internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, atau guru yang memiliki literasi digital yang baik (Heriyanto & Handri Santoso, 2025). Ketika siswa belajar tanpa paparan instrumen teknologi modern, mereka tidak memiliki pengalaman menggunakan perangkat lunak industri, sistem kolaborasi digital, atau pemahaman terkait keamanan siber dan otomatisasi.

### **Kesenjangan Keterampilan Sebagai Episentrum Krisis Ekonomi**

Kesenjangan keterampilan (*skills gap*) antara lulusan lembaga pendidikan dan kebutuhan dunia industri kini telah menjadi episentrum krisis ekonomi yang sekilas tidak terlihat namun dampaknya sangat destruktif. Ketika sistem pendidikan gagal merespons pergeseran tren di dunia industri-khususnya era otomatisasi, digitalisasi dan kecerdasan buatan. Negara mengalami paradoks yang membingungkan dimana negara menghadapi paradoks yang membingungkan: tingginya angka pengangguran terdidik terjadi bersamaan dengan jutaan lowongan pekerjaan spesifik yang tidak terisi karena kurangnya talenta yang memenuhi kualifikasi (Manik, et al 2025). Ketidaksesuaian (*mismatch*) ini bukan lagi sekadar masalah administratif ketenagakerjaan, melainkan ancaman langsung terhadap fundamental ekonomi yang menghambat laju produktivitas nasional, mengancam bonus demografi, dan menurunkan daya saing negara di pasar global. Akar dari krisis ini terletak pada asimetri kecepatan antara perubahan industri yang eksponensial dan lambatnya adaptasi kurikulum pendidikan. Dunia industri saat ini menuntut tenaga kerja yang memiliki kombinasi *hard skills* berbasis teknologi mutakhir dan *soft skills* tingkat tinggi, seperti pemecahan masalah kompleks, kelincahan kognitif, serta adaptabilitas. Sayangnya, banyak institusi pendidikan masih terjebak pada pendekatan konvensional yang mengutamakan teori dan hafalan ketimbang praktik analitis dan pemanfaatan teknologi. Akibatnya, rantai pasok dunia kerja terputus; lulusan yang dihasilkan tidak memiliki kompetensi yang relevan. Perusahaan pun pada akhirnya harus menanggung beban finansial dan waktu ekstra untuk pelatihan ulang kepada karyawan baru (*reskilling* dan *upskilling*), yang secara langsung memperlambat laju inovasi dan ekspansi bisnis. (Guofang et al., 2026).

### **Respon Kurikulum Nasional: Narasi Kebijakan "Link and Match"**

Menjembatani Ruang Hampa Pendidikan dan Realitas Pasar Sebagai respons langsung terhadap jurang pemisah yang semakin lebar antara kualitas lulusan dan ekspektasi pasar kerja, pemerintah merumuskan kebijakan strategis yang berpusat pada narasi "*Link and Match*". Kebijakan ini lahir dari kesadaran kritis bahwa kurikulum nasional tidak boleh lagi beroperasi di ruang hampa akademik yang terisolasi dari dinamika ekonomi dan kemajuan teknologi. Konsep "*Link and Match*" dirancang sebagai jembatan struktural untuk mensinkronkan capaian pembelajaran baik di tingkat pendidikan vokasi maupun akademik menengah dan tinggi dengan spesifikasi keahlian yang secara riil dibutuhkan oleh dunia Industri guna menekan angka *skills mismatch* yang membebani perekonomian (Wahjusaputri et al., 2024). Transformasi Kurikulum Berbasis Kebutuhan Industri dalam kerangka operasionalnya, narasi "*Link*

*and Match*" mendorong perombakan mendasar tentang bagaimana cara kurikulum disusun dan diimplementasikan (Precalya & Darwan 2021). Institusi pendidikan didorong untuk beralih dari model pembelajaran teoretis satu arah menuju *Case Method* dan *Project-Based Learning* (pembelajaran berbasis proyek) yang menggunakan studi kasus nyata dari industri dan melibatkan mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Kebijakan ini tidak hanya menuntut penyesuaian materi, tetapi juga integrasi total: mulai dari pelibatan praktisi industri sebagai pengajar, penyelarasan standar kompetensi, hingga penyediaan program magang terstruktur yang memberikan pengalaman kerja riil. Melalui ekosistem ini, ruang kelas bertransformasi menjadi miniatur tempat kerja, memastikan mahasiswa terbiasa dengan budaya kerja, tenggat waktu, dan standar profesionalisme sejak dini. Meskipun narasi "*Link and Match*" menawarkan cetak biru penyelesaian krisis keterampilan, keberhasilannya sangat bergantung pada perubahan paradigma antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa kolaborasi yang terjalin bukanlah sekadar formalitas administratif atau penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) semata, melainkan sebuah kemitraan yang substansial (*deep match*). Industri diharapkan tidak lagi hanya bertindak sebagai "konsumen" pasif yang mengeluhkan kualitas lulusan, melainkan harus berperan aktif sebagai "investor (co-creator)" dalam pengembangan *output* (Yoto & Widiyanti, 2017). Jika ekosistem dua arah ini berhasil dibangun, kurikulum nasional tidak hanya akan sekadar mencetak tenaga kerja siap pakai, tetapi mampu melahirkan inovator yang akan mendorong daya saing industri nasional ke tingkat global. Adanya revitalisasi vokasi menimbulkan berbagai program baru seperti rekognisi kegiatan diluar kelas dan pemagangan industri, sebagai jargon "*Link and Match*" yang dikampanyekan secara masif sebagai solusi cepat mengatasi pengangguran.

### **Kegagalan Adaptasi: Kurikulum Nasional Gagal Menjawab Krisis Ekonomi**

Meskipun respon kebijakan secara tertulis tampak menjanjikan, narasi evaluatif dari para praktisi pendidikan dan industri menyoroti kegagalan sistemik dalam implementasinya. Pembahasan mengungkap beberapa akar kegagalan Kurikulum Nasional sebagai berikut:

#### **1. Pilar Kolaborasi: Ilusi Keterlibatan Industri (Tokenism)**

Konsep "*Link and Match*" di atas kertas dirancang untuk menyinkronkan pendidikan dengan dunia nyata. Namun, di lapangan, keterlibatan sektor industri sering kali terjebak dalam formalitas administratif semata. Hubungan ini bersifat ilusif (*tokenisme*) karena kerja sama biasanya hanya berhenti pada penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) tanpa adanya tindak lanjut pembelajaran yang nyata. Industri jarang dilibatkan dalam perancangan materi substansial atau penentuan standar evaluasi. Hal ini menciptakan dinamika yang timpang: industri hanya bertindak sebagai "konsumen" pasif yang terus mengeluhkan rendahnya kualitas lulusan, bukannya mengambil peran esensial sebagai "investor" dalam mengembangkan *output* pendidikan. Menurut (Wahjusaputri et al., 2024) kolaborasi harusnya bersifat *deep match* di mana industri terlibat total, namun kenyataannya industri masih menjadi "konsumen pasif. Tanpa peran industri sebagai investor, kurikulum akan tetap terisolasi dari kebutuhan pasar (Yoto & Widiyanti, 2017).

#### **2. Pilar Struktural: Kelambanan Birokrasi vs. Kecepatan Pasar**

Akar kegagalan struktural terletak pada ketimpangan (asimetri) kecepatan yang sangat besar antara proses regulasi pemerintah dan perubahan tren di pasar tenaga kerja. Birokrasi pendidikan berjalan linear; siklus perumusan, uji coba, hingga implementasi kurikulum nasional memakan waktu hingga bertahun-tahun. Di kutub yang berlawanan, kebutuhan keterampilan industri berubah secara eksponensial akibat disrupsi teknologi dan dampak pasca-pandemi. Akibat kelambanan ini, sistem pendidikan menjadi tidak sensitif dan terlalu lambat untuk merespons volatilitas pasar. Ironisnya, saat sebuah kurikulum akhirnya selesai diimplementasikan secara massal, materi yang diajarkan sering kali sudah usang dibandingkan kebutuhan industri pada detik tersebut. Terdapat asimetri kecepatan yang mencolok antara regulasi pemerintah dengan dinamika dunia usaha. Siklus kurikulum nasional dari perumusan hingga implementasi memakan waktu bertahun-tahun, sementara disrupsi teknologi dan perubahan kebutuhan industri terjadi secara eksponensial. Akibatnya, kurikulum sering kali sudah usang sebelum sempat diterapkan secara merata. Kelambanan ini menyebabkan sistem pendidikan tereliminasi dari realitas pasar kerja (Dewi, 2024).

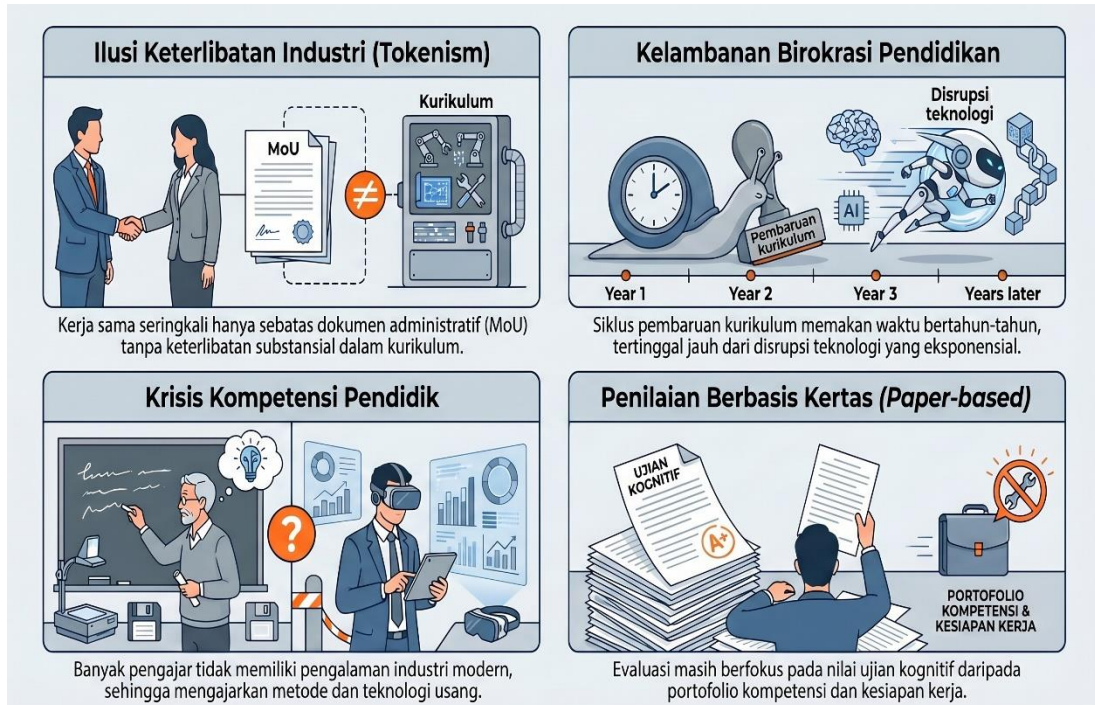
### 3. Pilar Aktor: Krisis Kompetensi dan Isolasi Pendidik

Desain kurikulum yang mutakhir sekalipun tidak akan berdampak jika aktor utamanya (guru dan dosen) tidak kompeten secara praktis. Narasi dominan menunjukkan adanya krisis kompetensi di mana para pendidik diasingkan dari realitas industri. Banyak pendidik yang tidak memiliki pengalaman kerja nyata di industri modern. Karena mereka terisolasi dari dinamika dunia usaha yang sebenarnya, batas pengetahuan mereka berhenti pada literatur akademis. Akibatnya, pendidik cenderung mengajarkan teknologi atau metode kerja yang sudah ketinggalan zaman. Transformasi kurikulum pada akhirnya hanya terlihat megah di atas kertas regulasi, namun gagal total dalam praktik instruksional di ruang kelas. Kualitas lulusan sangat ditentukan oleh pendidiknya, namun terjadi kesenjangan antara kompetensi guru atau dosen dengan realitas industri modern. Narasi dalam sumber menunjukkan bahwa banyak pendidik diasingkan dari realitas industri. Mereka tidak memiliki pengalaman kerja nyata di sektor modern, sehingga metode atau teknologi yang diajarkan sudah tidak relevan atau usang. Meskipun desain kebijakan tampak hebat, eksekusinya gagal karena pendidik tidak memiliki paparan langsung terhadap praktik industri terkini (Akbar et al., 2023).

### 4. Pilar Evaluasi: Orientasi Penilaian Berbasis Kertas (*Paper-based Orientation*)

Kegagalan kurikulum semakin diperparah oleh sistem evaluasi nasional yang reduksionis, yakni masih berorientasi pada kemampuan di atas kertas seperti ijazah dan nilai ujian standar. Sistem ini lebih memprioritaskan kemampuan kognitif-teoretis dan gagal mengukur kompetensi nyata maupun keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Karena parameter keberhasilan diukur dari ujian teoretis, seluruh ekosistem sekolah (mulai dari kepala sekolah, guru, hingga siswa) terdorong untuk sekadar mencetak lulusan yang "lulus ujian" dengan nilai yang tinggi. Pendidikan kehilangan ruh utamanya untuk membentuk individu dengan portofolio kompetensi psikomotorik yang siap pakai di lapangan atau lulusan yang "siap bekerja". Sistem penilaian nasional masih terjebak pada pengukuran kemampuan kognitif di atas kertas daripada kompetensi nyata. Fokus utama sekolah masih pada perolehan ijazah dan nilai ujian standar. Hal ini mengabaikan pembentukan portofolio kompetensi (psikomotorik) yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh perusahaan untuk memecahkan masalah kompleks (problem solving). Hal ini

diperkuat oleh temuan (Akbar et al., 2023) bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) didapatkan melalui latihan yang mendalam, namun sering kali sistem evaluasi yang ada lebih mendorong teknik hafalan dan soal pilihan ganda bukan soal berbentuk esai yang membutuhkan jawaban terbuka.



Gambar 1. Empat Pilar Kegagalan Kurikulum Nasional

Kegagalan adaptasi kurikulum nasional menciptakan lingkaran "setan" ekonomi. Ketika birokrasi yang lambat berkolaborasi dengan industri secara dangkal (*tokenism*), kurikulum yang dihasilkan tidak memiliki substansi praktis. Kurikulum ini kemudian diajarkan oleh pendidik yang kurang kompeten secara industri dan dinilai melalui sistem ujian teoretis. Hasil akhirnya adalah Paradoks Tenaga Kerja yaitu tingginya angka pengangguran terdidik sekitar 7,35 juta orang pada Tahun 2025 yang terjadi bersamaan dengan kekosongan jutaan lowongan kerja spesifik. Ketidaksesuaian (*mismatch*) ini menjadi episentrum krisis ekonomi karena memicu stagnasi produktivitas, menghambat inovasi perusahaan, dan memaksa industri menanggung beban finansial ekstra untuk pelatihan ulang (*reskilling*). Dengan demikian, kurikulum nasional yang gagal beradaptasi secara langsung mengancam stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global Indonesia.

**KESIMPULAN**

Kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri di era digitalisasi telah memicu krisis ekonomi struktural, yang ditandai dengan tingginya angka pengangguran terbuka yang terjadi bersamaan dengan ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja. Krisis ini berakar dari rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa akibat pembelajaran yang masih berfokus pada teknik hafalan. Selain itu, kesenjangan literasi digital serta infrastruktur teknologi yang belum merata juga menjadi masalah krusial yang berdampak langsung pada kesiapan tenaga kerja. Ketidaksesuaian kompetensi ini bukan sekadar masalah pendidikan, melainkan ancaman nyata yang menghambat produktivitas nasional dan menurunkan daya saing ekonomi negara di pasar global. Sebagai respons atas

krisis tersebut, pemerintah mengusung kebijakan "Link and Match" yang dirancang untuk menyinkronkan capaian pembelajaran kurikulum nasional dengan kebutuhan nyata di dunia industri. Sayangnya, implementasi kebijakan ini masih menemui berbagai kegagalan sistemik. Kegagalan adaptasi ini disebabkan oleh keterlibatan industri yang sering kali hanya sebatas formalitas administratif (MoU), kelambanan birokrasi pendidikan dalam mengikuti perubahan eksponensial pasar, serta kurangnya pengalaman para pendidik terhadap praktik industri modern. Ditambah lagi, sistem evaluasi yang masih berorientasi pada nilai di atas kertas (paper-based) membuat ekosistem pendidikan lebih berfokus mencetak lulusan yang hanya sekadar lulus ujian, alih-alih lulusan yang benar-benar siap bekerja di lapangan. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu pada jumlah literatur, walaupun rentang waktunya relevan dengan isu terkini, jumlah literatur yang dianalisis tergolong terbatas untuk memotret secara menyeluruh dinamika kebijakan pendidikan nasional yang sangat luas dan kompleks di Indonesia. Kedua, analisis ini menitikberatkan pada kegagalan kurikulum nasional. Kurangnya yaitu pada eksplorasi terhadap faktor eksternal lain di luar pendidikan seperti makroekonomi global, regulasi investasi, dan kebijakan pemberian upah yang mungkin mempengaruhi daya serap tenaga kerja dari kualitas kurikulum yang diimplementasikan. Karena penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur naratif yang bersifat sekunder, penelitian selanjutnya perlu melakukan kajian empiris dengan melibatkan data primer melalui wawancara mendalam praktisi industri, pakar kurikulum dan kepala sekolah untuk memvalidasi apakah fenomena "tokenisme industri" masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan Link and Match.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. H., Aditya, I., & Ramdani, R. (2023). Tantangan Dan Peran Perguruan Tinggi Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Disrupsi Kompetensi Tenaga Kerja. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.25157/dak.v10i2.11357>
- Anisti, A., Sidarta, V., Imran, M., & Syatir, S. (2024). Tantangan Literasi Digital Generasi Z: Kajian Sistematis Literature Review. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 30(2), 152–161. <https://doi.org/10.33751/wahana.v30i2.11870>
- Anwar, A., Margawari Novel, & Suharni. (2025). Kemampuan Pemecahan Masalah: Analisis Pada Siswa SMP. *Mandalika Mathematics and Educations Journal*, 7(2), 540–556. <https://doi.org/10.29303/jm.v7i2.9075>
- Dewi, D. R. (2024). *Pengembangan Kurikulum di Indonesia Dalam Menghadapi Tuntutan Abad Ke-21*. 2, 306–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1>
- Dilly, A. (2021). *Analisis dampak mismatch kualifikasi pendidikan dan pekerjaan*. 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.53712/jmm.v6i1.1095>
- Guofang, Z., Rasul, M. S., & Omar, M. (2026). Factors influencing cross-border e-commerce enterprises' engagement in vocational education partnerships. *Journal of Education and Learning*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v20i1.23577>
- Hafiza, Sofyardi, & Elfindri. (2020). Analisis Kesenjangan Keterampilan Pada Sektor Industri Pengolahan Di Kota Payakumbuh Skills Gap Analysis in the Manufacturing Sector in Payakumbuh City. *Menara Ilmu*, 14(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v14i1.2107>
- Hendrayadi 1, Yunus 2\*, E. M. 3. (2025). *Transformasi Pendidikan Di Era Digital: Analisis Dampak Perubahan Sosial Terhadap Kualitas Pembelajaran*. 6(2), 1334–1339. <https://doi.org/10.55352/mudir.v7i1.1290>
- Heriyanto, & Handri Santoso. (2025). Analisa Kesiapan Sekolah dalam Pemanfaatan Teknologi untuk Pembelajaran. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1 Februari), 223–232.

<https://doi.org/10.58230/27454312.1981>

- Kurniawan, N. A., Hidayah, N., & Rahman, D. H. (2021). Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMK. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 6(3), 334. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v6i3.14579>
- Kusuma, E., Handayani, A., & Rakhmawati, D. (2024). Pentingnya Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Pada Siswa Sekolah Dasar: Sebuah Tinjauan Literatur. *Wawasan Pendidikan*, 4(2), 369–379. <https://doi.org/10.26877/jwp.v4i2.17971>
- Maryono, M. (2016). Pendidikan Merupakan Garda Terdepan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.26737/jpipsi.v1i1.111>
- Nana Rismana & Sari Hernawati. (2019). Pengembangan Kurikulum Di Indonesia Dalam Menghadapi Tuntutan Abad Ke-21. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.123>
- OECD. (2023). PISA 2022 Results. In *Factsheets: Vol. I*. [https://www.oecd-ilibrary.org/educstion/pisa-2022-results-volume-i\\_53f23881-en](https://www.oecd-ilibrary.org/educstion/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en)
- Precalya, H. M. (2021). LINK & MATCH Pendidikan Sebagai Ideologi Neoliberalisme (Analisis Wacana tentang Dominasi Elit dalam Pendidikan Kejuruan di Indonesia). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1416–1425. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2561>
- Rani Irmawati, Aisyah Rahayu, S. R. (2022). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) Pada Materi Aljabar. *Jurnal PEKA (Pendidikan Matematika)*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.37150/jp.v6i1.1546>
- Wahjusaputri, S., Rahmanto, M. A., Suciani, S., & Kustantini, S. (2024). Implementation of the 8+i link and match vocational school program. *Journal of Education and Learning*, 18(1), 72–78. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v18i1.20829>
- Wulandari Manik, C., Natasya Boru Giting, H., Aini, L., Salsabila, & Hidayat, N. (2025). Analisis Bonus Demografi Ditengah Tingginya Pengangguran Terdidik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 4(1), 86–96. <https://doi.org/10.37905/geojpg.v3i2.31656>
- Yoto, & Widiyanti. (2017). Vocational High School Cooperation with PT Astra Honda Motor to Prepare Skilled Labor in Industries. *International Journal of Environmental and Science Education*, 12(3), 585–596. <https://doi.org/10.12973/ijese.2017.1249p>